

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN, PELATIHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Reza Aprina, Febri Yuliani dan Zaili Rusli

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Development Program Evaluation, Vagrant Training and Beggars. The purpose of this study was to determine the evaluation of homeless and beggar training programs in Pekanbaru City as well as what factors influence the evaluation of homeless and beggar training programs in Pekanbaru City. This study uses approach, observation and documentation. Qualitative descriptive research method. Primary data is obtained directly through interviews, research informants namely the Head of Social Rehabilitation Division, Head of the Secretariat / Responsible Division of Salter, Salter employees, and the community. Data analysis uses interactive methods ranging from data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of the Evaluation of the implementation of training programs for homeless and beggar training in the city of Pekanbaru has not yet achieved the expected results, in which the implementation of social welfare goals is sprawl.

Keywords: evaluation, program, training coaching, homeless, beggars

Abstrak: Evaluasi Program Pembinaan, Pelatihan Gelandangan dan Pengemis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru serta apa saja faktor yang mempengaruhi evaluasi program pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan, observasi dan dokumentasi. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, *informan* penelitian yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Sekretariat/Penanggung Jawab Salter, pegawai salter, dan masyarakat. Analisis data menggunakan metode interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan program pelatihan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang diharapkan, dimana dalam pelaksanaannya tidak tercapainya tujuan kesejahteraan sosial gepeng

Kata kunci: evaluasi, program, pembinaan pelatihan, gelandangan, pengemis

PENDAHULUAN

Gelandangan merupakan bagian dari fenomena dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Pengaturan tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar secara umum yaitu ada di dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Berdasarkan rumusan pasal tersebut negaralah yang berperan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sebagai pelaksana dari Pasal 34 (1) UUD 1945 tersebut selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin. Da-

lam ketentuan Umum Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. fakir miskin kurang mendapatkan kesejahteraan sehingga perlu adanya perlindungan sosial.

Kesejahteraan sosial ini wujud dari adanya perlindungan sosial seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: "Perlindungan Sosial adalah

semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”. Kewajiban memelihara dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi gelandangan dan pengemis. Negara melaksanakan kesejahteraan sosial dengan berdasarkan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2009 menentukan bahwa: “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Munculnya gelandangan dilingkungan perkotaan merupakan gejala sosial budaya yang relatif menarik. Pada umumnya gejala tersebut dihubungkan dengan perkembangan lingkungan perkotaan. Kondisi semacam ini membawa implikasi terhadap semakin kuatnya berbeda atau berseberangan dengan konstruksi kehidupan “resmi”. Kedatangan kaum gelandangan ini disebabkan karena tekanan pajak atau penyitaan tanah oleh negara di daerah asal kaum fakir dan terlantar tersebut. Kebiasaan para gelandangan mengembara, seperti sebagian besar masyarakat tradisional pada umumnya. Kebiasaan ini pun muncul dengan adanya urbanisasi dari berbagai tempat menuju ke kota Pekanbaru sebagai tempat bagi orang-orang yang mengadu nasib sebagai pendatang, walaupun tekanan-tekanan eksternal yang dialami para gelandangan di

Kota besar untuk sekedar bertahan hidup sangatlah sulit serta keberadaan kaum gelandangan di daerah perkotaan cukup banyak, namun pada kenyataannya jumlah gelandangan juga tidak berkurang. Kota Pekanbaru merupakan Kota Madani dan kota konsumtif, kenyataannya banyak para gelandangan dan pengemis bersimbiosis di Kota Pekanbaru dan itu rata-rata anak dibawah umur.

Banyak anak-anak di bawah umur untuk mempertahankan hidupnya, mereka bekerja untuk mencukupi hidupnya dengan cara mengemis. Kondisi hidup di jalanan yang relatif keras dan penuh dengan tekanan-tekanan dari masyarakat luar cenderung mengarahkan mereka untuk sekedar dapat memenuhi kebutuhan makannya saja. Dalam keterbatasan “ruang hidup” sebagai gelandangan tersebut, mereka berusaha untuk sekedar dapat bertahan hidup di daerah perkotaan dengan berbagai macam cara, seperti mencopet, mengemis, melacurkan dan mengamen.

Sejauh ini Satpol PP belum optimal dalam melakukan sosialisasi tentang penertiban gepeng. Hal ini terbukti masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis. Satpol PP melakukan tugasnya hanya dengan menggunakan kendaraan dinas, memakai mic serta memasang spanduk pada sudut kota dan melakukan iklan layanan publik pada sejumlah surat kabar dan radio daerah.

Hal ini belum maksimal, karena jika sosialisasi itu maksimal, maka warga niscaya tidak memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan sehingga jumlah gepeng tiapa tahun berkurang. Melihat kondisi ini pemerintah kota memberlakukan kebijakan dengan menetapkan denda sebesar 50 juta rupiah serta ancaman 3 bulan penjara bagi masyarakat yang melanggar ketentuan Perda yang berlaku. Begitu juga halnya kepada gepeng yang terjaring dilakukan pembinaan, pelatihan seperti tercantum pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi pengemis berdasarkan jenis keterampilan yang diberikan di Kota Pekanbaru tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah diberi Keterampilan	Jenis Keterampilan	Sumber Dana
1	2013	30	Bimbingan sosial, pelatihan keterampilan olah pangan	APBN
2	2014	20	Bimbangan sosial Olah pangan dan kerajinan	APBD
3	2015	20	Bimbangan sosial Olah pangan dan kerajinan	APBD
4	2016	20	Bimbangan sosial Olah pangan dan kerajinan Olah pangan dan kue	APBD
5	2017	20	Bimbangan sosial	APBD
Jumlah		110		

Sumber: Dinas Sosial 2018

Dari gambaran serta fenomena yang ada, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian, bagaimana pelaksanaan evaluasi program pembinaan, pelatihan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru?.

Menurut Anderson dalam Winarno (2002) Evaluasi kebijakan itu dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak, dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan.

Ada 3 tipe evaluasi kebijakn publik menurut Anderson dalam Winarno (2002) yaitu :

- a. Tipe evalusi kebijakan fungsional
- b. Tipe evaluasi yang memfokuskan diri terhadap bagaimana bekerjanya suatu kebijakan
- c. Tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Menurut Suchman dan Winarno (2002) mengidentifikasi beberapa pernyataan oprasional untuk menjalankan riset evaluasi yakni :

- 1) Apa saja yang menjadi isi dari tujuan program
- 2) Siapa yang menjadi target program

- 3) Kapan perubahan yang diharapkan
- 4) Apakah tujuan yang di ditetapkan satu atau banyak
- 5) Apakah dampak yang di diharapkan besar
- 6) Bagaimana tujuan-tujuan tersebut dicapai

Secara umum, evaluasi yang mendasar diri pada analisis ekonomi ini mampu menyajikan informasi yang meyakinkan (semisal digunakannya rumus-rumus matematika dan data-data statistik), namun ia tidak sanggup memperhitungkan serta membebarkan berbagai aspek penting dari perkembangan kebijakan terutama sekali kenapa kebijakan-kebijakan pembangunan tertentu berhasil atau gagal, Wahab (2008).

Menurut Dunn dalam Subarsono, 2012 mengemukakan untuk evaluasi program dapat berjalan dengan baik maka harus di perhatikan beberapa faktor yaitu :

1. Input adalah
2. Proses
3. Output
4. Outcomes
5. Impact
6. Benefit

Menurut Subarsono (2005) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat di rinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat

- pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
 3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran output dari suatu kebijakan.
 4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
 5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

METODE

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari dua jenis yaitu informan kunci (*key Informan*) dan informan biasa. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sekertaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial
3. Pegawai Salter (Tempat Penampungan Gelandangan Dan Pengemis)
4. Masyarakat

Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Berdasarkan penelitian evaluasi program pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, di peroleh hasil input, proses, *output, outcomes, impact*

dan *benefit* dalam pelaksanaan kegiatan tidak terpenuhi dengan baik.

Evaluasi pelaksanaan program pelatihan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang diharapkan, dimana dalam pelaksanaannya tidak memadai anggaran dan sarana pendukung pembinaan dan pelatihan serta pemulihan dan pemulangan gepeng ke tengah masyarakat menjad sebab tidak tercapainya tujuan kesejahteraan sosial gepeng, Selain itu. Sikap masyarakat dan tidak adanya sanksi denda yang memang di jalankan bukan hanya wacana yang telah di atur oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008, yang dijalankan instansi terkait menjadi gepeng semakin marak dan leluasa menjadikan Pekanbaru sasaran bagi bagi mereka yang mengemis sebagai profesi.

Faktor yang mempengaruhi atau belum memadainya pelatihan pembinaan gepeng antara lain adalah faktor ketersediaan anggaran yang sangat minim untuk pelatihan gepeng, tidak berjalannya sanksi hukum yang tegas kepada masyarakat yang memberikan sumbangan pada gepeng yang ada di jalan-jalan, masalah kemiskinan kondisi sosial masyarakat yang menyebabkan harus melakukan gelandangan dan mengemis, Rendahnya tingkat pengetahuan agama yang mana rendahnya agama karna didalam agama tidak di perbolehkannya meminta minta dalam bentuk apapun, faktor sosial budaya yang juga mempengaruhi faktor gelandangan dan pengemis rendahnya nilai-nilai sosial yang melekat pada diri seseorang.

Sebuah kebijakan/program di implementasikan atau di transformasikan ke masyarakat dalam bentuk pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis. Sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 bahwa pembinaan pelatihan adalah suatu proses atau cara melakukan tindakan *preventif* (pencegahan), *represif* dan *rehabilitasi*.

a. Tindakan Pencegahan.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 di sebutkan bahwa pencegahan preventif adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan atau membatasi tumbuh dan berkembangnya gelandangan dan pengemis. Tindakan pencegahan tersebut dapat dilakukan apabila masyarakat memiliki kesadaran dan berpartisipasi dalam ketertiban sosial untuk mewujudkan kegiatan pelatihan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Untuk membatasi tumbuh dan berkembangnya gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru maka masyarakat sebagai kelompok sasaran bagi gelandangan dan pengemis dapat berperan dalam menjalankan program pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Dalam pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 di sebutkan batasan peran masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis atau dengan kata lain disebutkan bahwa dalam tindakan pencegahan berkembangnya gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru maka bagi setiap orang di larang yaitu:

- Pasal 3 ayat (2) di larang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang ataupun barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.
- Pasal 4 ayat (1) setiap orang atau kelompok di larang melakukan usaha penampungan, membentuk atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengekloitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka. Ayat (2) setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat/bangunan rumah/pertokoan/perkantoran untuk di gunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis.

Kemudian dalam BAB XII tentang ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan 4 di atas, disebutkan bahwa dalam pasal 29 ayat (1) barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini di ancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 Bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal adalah pelanggaran.

- Sosialisasi dan sikap masyarakat
Kegiatan sosialisasi pada sebuah program/kegiatan sangat dibutuhkan karena dengan cara program dapat di publikasikan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana kegiatan itu, apa tujuannya dan begitu pula dengan pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis adalah sebuah kegiatan yang sasaran utamanya adalah masyarakat.

b. Usaha Represif

Berdasarkan pelaksanaan program ketertiban sosial dalam pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, salah satu yang di lakukan adalah usaha represif adalah usaha yang terorganisir dengan maksud meniadakan gelandangan dan pengemis yang berkeliaranserta mencegah meluasnya di masyarakat.

Dari keseluruhan hasil wawancara dan observasi dan studi kepustakaan peneliti. Terkait usaha represif atau penindakan yang di lakukan Dinas Sosial untuk meniadakan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru melalui :

- Dinas Sosial Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Satpol PP melakukan patroli sebanyak 3 kali dalam 3/4 bulan
- Pembentukan tugas penertiban atau razia antas lintas instansi.
- Penertiban dilakukan secara *countinuiue*

Namun dalam kenyataan di lapangan belum optimal untuk mencapai hasil yang di harapkan hal tersebut di ketahui dengan masih banyak berkeliaran gelandangan dan pengemis di perempatan jalan umum Kota Pekanbaru, bahkan usai dilakukan razia/ penertiban para gelandangan dan pengemis telah kembali berkeliaran pada lokasi tersebut.

c. Usaha Rehabilitasi

Usaha rehabilitasi dilakukan setelah tindakan represif berjalan. Usaha rehabilitasi Sosial terhadap gelandangan dan pengemis adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberi pelatihan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah emat asal mereka tinggal, pengawasan serta pembinaan berkelanjutan, sehingga dengan demikian para gelandangan dan/atau pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

Dalam melakukan usaha reeabilitas Dinas Sosial sebagai tindak lanjut raazia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan atau instansi gabungan maupun oleh Dinas Sosial, kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik

PEMBAHASAN

Program pelatihan pembinaan dan pengemis (gepeng) dilaksanakan dengan tujuan untuk meniadakan gepeng dan memanusiaikan kembali gepeng sesuai prinsip-prinsip pelatihan dan pembinaan gelandangan dan pengemis ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Dana

Tidak bisa di pungkiri dana adalah faktor terpenting untuk menjalankan pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis mulai dari penertiban, pelatihan, pemulangan, penyantunan gelandangan dan penge-

mis dengan tujuan kesejahteraan sosial yaitu mewujudkan, membina dan memulihkan.

b. Keterampilan

Kerja keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik khususnya pada diri sendiri dan umumnya pada lingkungan sekitar. Potensi diri dapat di gali di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan sangat erat kaitannya dengan keterampilan, orang yang memilki pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan rendah juga memiliki keterampilan rendah juga.

Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan seseorang dapat menghasilkan dan memiliki aset produksi. Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kerja pasar kerja, cirri-ciri orang yang berada dalam garis kemiskinan adalah orang hidup di kota orang dengan usia muda namun tidak memiliki keterampilan. Sehingga tidak ada jalan lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya mereka-pun harus mengemis di tempat-tempat umum. Oleh karena itu, kegiatan mengge-landang dan mengemis adalah pilihan yang paling gampang untuk dilaksanakan guna memperoleh penghasilan secara mudah. Tetapi menurut mereka, mengemis itu terkadang agak sulit untuk memperoleh uang karena harus berkeliling dan mencoba untuk meminta-minta, dimana tidak sema calon pemberi sedekah langsung memberkannya, dan bahkan tidak memperdulikannya.

c. Pendidikan Rendah

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang. Pendidikan sangat berepengaruh terhadap persaingan di dunia kerja, oleh sebab itu pendi-

dikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan kemiskinan. Dalam dunia kerja, kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Apabila seseorang berpendidikan rendah dalam arti hanya memiliki ijazah sekolah dasar akan sangat sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Sedangkan gelandangan dan pengemis juga memerlukan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dari rdnahnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis inilah yang membuat mereka terpaksa hidup dalam keterbatasan yang sampai mengakibatkan mereka harus tinggal di alam terbuka dan bekerja dengan cara meminta-minta.

d. Masalah Kemiskinan

Secara garis besar gelandangan dan pengemis tersebut terbagi atas dua tipe yaitu gelandangan dan pengemis miskin materi dan gelandangan dan pengemis miskin mental. Gepeng yang miskin materi adalah mereka yang tidak mempunyai uang atau harta sehingga memutuskan untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis. Berbeda jauh dengan gepeng miskin materi, dalam hal ini gepeng miskin mental masih mungkin memiliki harta benda namun mental yang dimiliki membuat atau mendorong mereka menggelandang dan mengemis.

Maksud mental disini adalah mental malas untuk melakukan sesuatu. Malas adalah sebuah sikap dan sifat apabila lama di pendam dan di ikuti akan mempengaruhi mental, karena terbiasa malas atau mendapatkan kemudahan secara instan membuat seseorang bermental seperti itu. Kemiskinan yang di alami masyarakat, membuat keadaan mereka sangat tertekan baik dalam segi mental maupun materi, membuat masyarakat tidak segan-segan turun ke jalan untuk menggelandang, memakai pakaian compang-camping untuk meminta belas kasihan kepada masyarakat, hal ini membuat masyarakat iba hati melihat keadaan seperti itu.

e. Rendahnya Tingkat Pengetahuan Agama

Dalam hal ini kebanyakan pengemis tidak mengetahui bahwa adanya larangan atau ayat dan hadist melarang memintaminta terhadap sesama manusia selain kepada Allah swt, dan kepadanya lah kita memintaminta pertolongan. Hal ini membuktikan bahwa pengemis kebanyakan kurangnya pengetahuan tentang agama soal memintaminta kepada sesama selain Allah swt.

f. Faktor Sosial Budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis adalah rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidakdimilikinya rasa malu untuk memintaminta; sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan; dan kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang.

Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidupmenggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian. (Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, 2005)

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian evaluasi program pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, di peroleh hasil input, proses, *output*, *outcomes*, *impact* dan *benefit* dalam pelaksanaan kegiatan tidak terpenuhi dengan baik.

Evaluasi pelaksanaan program pelatihan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang diharapkan, dimana dalam pelaksanaannya tidak memadai anggaran dan sarana pendukung pembinaan dan pelatihan serta pemulihan dan pemulangan gepeng ke tengah masyarakat menjadi sebab tidak tercapainya tujuan kesejahteraan sosial gepeng. Sikap masyarakat dan tidak adanya sanksi

denda yang memang di jalankan bukan hanya wacana yang telah di atur oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008, yang di jalankan instansi terkait menjadi gepeng semakin marak dan leluasa menjadikan Pekanbaru sasaran bagi bagi mereka yang mengemis sebagai profesi.

Faktor yang mempengaruhi atau belum memadainya pelatihan pembinaan gepeng antara lain adalah faktor ketersediaan anggaran yang sangat minim untuk pelatihan gepeng, tidak berjalannya

DAFTAR RUJUKAN

Dun, William N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Meter dan Horn, 1975, *The Policy Implementation Process : A Conseptual Framework*, Administration and Society.

Nugroho, D Riant. 2003. *Kebijakan Publik fomulasi, Impelementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.

Subarsono AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Wahab. Abdul. Solichin, 2001, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebjaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2005 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Media Pressindo.